

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan, perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat persatuan dan kesatuan Bangsa.

Pemerintah desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini di atur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang di terbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang pada paragraph 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.¹

Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran serta masyarakat tidak satupun yang dapatberkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang merupakan faktor yang tidak dianggap dapat mempengaruhi peran serta masyarakat. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah kepala desa.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. *Tentang Desa*.

Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional maka diperlukan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang meliputi pusat sampai ke daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah diharapkan mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing secara maksimal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah.

Tujuan dari otonomi daerah secara umum adalah untuk meningkatkan kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh unsur bangsa yang beragam di dalam bingkai Negara Republik Indonesia dan salah satunya adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan Kesatuan bangsa.

Pemerintah daerah sebagai perangkat pemerintah pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah. Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang merupakan pelaksana pembangunan dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Keberhasilan atau kegagalan peningkatan pembangunan di desa sangat ditentukan oleh kinerja kepala desa, yang sejauh mana kepala desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian, pelaksanaan, dalam kaitannya dengan

manajemen. Berkaitan dengan hal tersebut bangsa Indonesia melakukan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berencana menyeluruh terpadu dan terarah, bertahap dan berlanjut untuk memacu meningkatkan kemampuan Nasional dalam masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang dikenal dengan pembangunan Nasional.

Peran Kepala Desa dalam pembangunan wilayah pedesaan memiliki fungsi yang sangat strategis, sehingga kehadirannya dalam berbagai aktivitas pembangunan tidak dapat dihindari lagi. Ini berarti pemimpin harus memiliki idealisme kuat, serta dia harus dapat menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara sejelas mungkin, mengikuti kehendak yang dibentuk masyarakat, serta perkembangan masyarakat. Permana (2014:22) menyatakan bahwa:

Peran seorang kepala desa adalah hal yang sangat penting, karena posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang berhak atas keputusan mengayomi masyarakatnya sehingga turut bekerja sama dalam pembangunan itu sendiri.²

Pembangunan Nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh karena pemerintah desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan,

² Permana R. 2014. Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. (Internet). (diunduh 26 Januari 2016). Diunduh dari <http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/?p=970>. hal 22

pembangunan dan kemasyarakatan maupun sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayah kekuasaannya.

Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas di bidang administrasi seperti mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pemerintah, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah desa yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun Nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Partisipasi masyarakat adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun secara berkelompok maupun masyarakat untuk menyatukan kepentingan atau keterkaitan mereka terhadap organisasi atau masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat tersebut. Partisipasi dapat di definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa, maka perlu ditingkatkan sumber daya manusia dan berkualitas penduduk desa yang makin mantap. Hal itu harus didukung adanya kesadaran masyarakat desa tentang perlunya pendidikan sebagai dasar untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang selalu tahu teknologi sehingga dimungkinkan pembangunan nasional akan lebih maju karena didukung oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang luas.

Pembangunan nasional sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya, mengandung arti bahwa warga masyarakat perlu dilibatkan dalam

proses tersebut, yaitu warga masyarakat perlu berperan serta dalam menyukseskan pembangunan, khususnya dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Adisasmita (2006:34) mengemukakan bahwa:

Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek yang dilaksanakan.³

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan menjadi pusat perhatian pemerintah karena daerah pedesaan merupakan bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat desa berarti melaksanakan amanah dari cita-cita kemerdekaan dan merupakan kewajiban warga Negara dalam mengisi kemerdekaan. Hal itu juga tidak terlepas dari keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa pada dasarnya merupakan panutan dan penuntun serta memberi motivasi bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi awal di Kantor Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2015 diketahui bahwa peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, maupun untuk mengarahkan warganya dan juga perangkat desa lainnya dalam rangka Pembangunan Desa dan melaksanakan Pemerintahan Desa dan untuk mencapai tujuan pembangunan desanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros”.

B. Rumusan Masalah

³ Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hal 34

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros”.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros.
2. Sebagai bahan acuan dalam pembuatan skripsi untuk meneliti selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para Kepala Desa dalam Perannya sebagai Administrator Pembangunan.

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Berdasarkan Hasil analisis dan Pembahasan dari hasil penelitian di simpulkan beberapa saran penelitian dikemukakan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan data hasil penelitian ini di simpulkan sebelumnya Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan sudah berjalan dengan baik, selaku pemerintah desa sudah menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai administrator pembangunan desa.

B. Implikasi

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan masyarakat maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah sebagai berikut :

Hasil penelitian mengenai variabel Peran kepala desa sebagai administrator pembangunan di desa moncongloe sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator sudah berjalan dengan baik, untuk itu perlu adanya upaya-upaya yang harus di lakukan oleh desa diantaranya sebagai berikut :

1. Peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator perlu adanya peningkatan.
2. Aspek-aspek yang diteliti adalah penelitian kualitatif maka untuk lebih mendalamnya perlu kiranya di lakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian kualitatif.

C. Saran

1. Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncoloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros berada dalam kategori baik dan perlu dipertahankan atau ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.
2. Perlunya dilakukan pengawasan yang secara rutin terutama terhadap kegiatan masyarakat yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.
3. Kepada masyarakat agar senantiasa memberikan sumbangsinya dalam proses penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
4. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis hendaknya menggunakan fokus yang lebih luas sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang peran kepala desa sebagai administrator pembangunan.